

BAB I

PENDAHULUAN

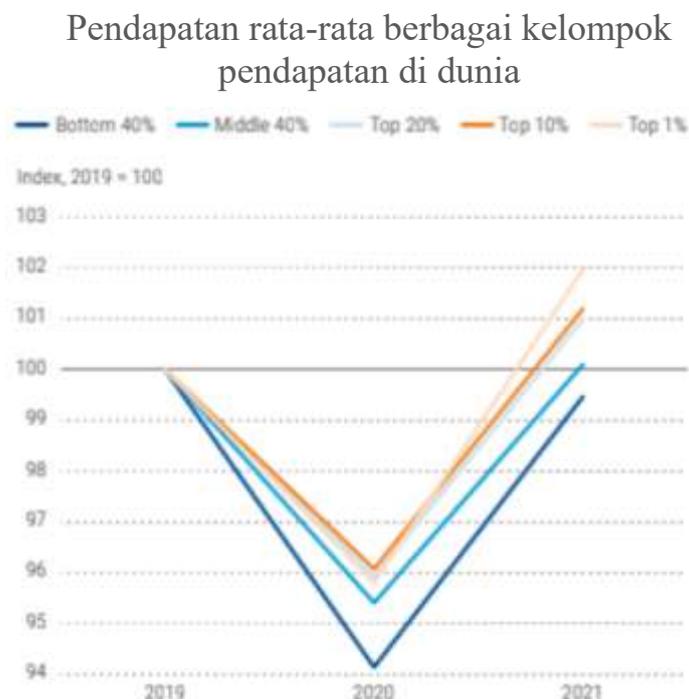
1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja ekonomi suatu negara. Proses ini mencakup berbagai perubahan signifikan, termasuk transformasi struktur sosial, penguatan kelembagaan, percepatan pertumbuhan ekonomi, perubahan sikap masyarakat, upaya pemberantasan korupsi, serta pengelolaan disparitas pendapatan (Todaro & Smith, 2020)

Disparitas pendapatan merujuk pada Perbedaan variasi yang signifikan dalam penghasilan yang diterima oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Kurniawan et al,(2023) menunjukkan bahwa disparitas disebabkan oleh perbedaan akses dan peluang ekonomi yang tidak merata. Pandangan Priastiwi,(2018) Disparitas pendapatan dapat diukur melalui berbagai indikator, salah satunya adalah Rasio Gini, dimana nilai indikator yang semakin tinggi menunjukkan tingkat disparitas yang semakin besar. Jika analisis dilakukan berdasarkan wilayah, terdapat perbedaan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hidayati & Bawono,(2020) menambahkan bahwa disparitas ini seringkali diperparah oleh perbedaan dalam penguasaan sumber daya ekonomi.

Menurut laporan PBB dalam *World Economic Situation and Prospects*,(2023) banyak negara telah mengalami peningkatan disparitas pendapatan, yang tercermin dalam kenaikan koefisien Gini.

Grafik 1.1 Pendapatan Rata-Rata berbagai Kelompok Pendapatan di Dunia



Sumber :UN DESA, berdasarkan Database DisparitasDunia.

Grafik tersebut menggambarkan rata-rata dari kelompok pendapatan yang berbeda di dunia dari tahun 2019 hingga 2021. Sumbu vertikal menunjukkan indeks pendapatan, dengan tahun 2019 sebagai tahun acuan (indeks 100). Terdapat lima kategori kelompok pendapatan yakni *bottom 40%*, *middle 40%*, *top 20%*, *top 10%*, dan *top 1%*. Dimana grafik ini menunjukkan peningkatan kesenjangan pendapatan di dunia. Perkembangan pendapatan ini sangat erat kaitannya dengan Koefisien Gini. Koefisien Gini sendiri adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh disparitas distribusi pendapatan di suatu negara. Nilai koefisien yang lebih tinggi menunjukkan bahwa ada lebih banyak ketimpangan. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa gap pendapatan antara kelompok kaya (*top 1%*, *top 10%*, *top 20%*) dan kelompok miskin (*bottom 40%*, *middle 40%*) bertambah besar pada tahun 2020, kemudian mulai menyempit kembali pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan

bahwa koefisien Gini kemungkinan besar meningkat pada tahun 2020 dan mulai menurun pada tahun 2021. Permasalahan disparitas pendapatan bukan hanya menjadi isu ditingkat global, tetapi juga merupakan realitas nyata yang terjadi di Negara Indonesia, menciptakan jueang yang signifikan antara kelompok-kelompok

Grafik 1.2 Indeks Gini Indonesia Tahun 2018-2023



Sumber : *World Development Indicators*

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa indeks gini Indonesi dalam kurun waktu 2018-2023 mengalami fluktuasu dengan kecenderungan meningkat pada tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang berupaya untuk mengurangi disparitas pendapatan di negara. Disparitas pendapatan di Indonesia merupakan isu yang signifikan dan kompleks, yang terus menjadi perhatian dalam konteks pembangunan ekonomi.

Sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada tujuan ke-10 yang berfokus pada pengurangan disparitas, terdapat penekanan yang signifikan pada upaya mengurangi disparitas pendapatan dan kekayaan, baik di dalam negara maupun antarnegara guna menciptakan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan. Fenomena disparitas ini perlu ditangani dengan serius, mengingat dampaknya yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketidakadilan dalam distribusi pendapatan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial yang merugikan seluruh masyarakat.

Menurut pandangan Nabila & Laut,(2021) perbedaan pendapatan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan juga menjadi faktor utama dalam disparitas ini. Di daerah perkotaan, tingkat pendapatan masyarakat cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan, hal ini disebabkan oleh adanya dukungan infrastruktur, akses terhadap layanan publik, serta keberadaan instansi dan perusahaan besar yang membuka lebih banyak peluang ekonomi. Hal ini mengarah pada ketidakmerataan dalam pembangunan ekonomi, yang pada gilirannya menciptakan kapasitas pertumbuhan yang berbeda-beda antar daerah (Pamiati & Woyanti,2021).

Dalam konteks ini, perekonomian Jawa Timur menjadi Provinsi yang menarik untuk dikaji, di mana provinsi ini didominasi oleh sektor industri dan pertanian. Sektor industri memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi Jawa Timur, menjadikannya salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Potensi lokasi strategis dan sektor-sektor unggulan di Jawa Timur memberikan peluang besar untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, meskipun pertumbuhan ini positif, tantangan disparitas pendapatan tetap ada di antara kabupaten dan kota, seperti yang diungkapkan oleh Arzaqi & Astuti,(2020). Upaya untuk memanfaatkan potensi ini harus diarahkan pada pemerataan kesejahteraan bagi seluruh

masyarakat, sehingga Disparitas yang ada dapat diminimalisir dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah

Grafik 1.3 Perkembangan Gini Rasio Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 diolah

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Timur, Gini Rasio untuk Provinsi tersebut pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,39 yang pada tahun sebelumnya menunjukkan Gini Rasio sebesar 0,37, dimana disparitas Provinsi Jawa timur meningkat sebesar 0,02 hal tersebut dikategorikan sebagai disparitas sedang. Sejalan dengan penelitian Todaro & Smith, (2020) nilai gini Rasio yang berada di kisaran 0,36 – 0,49 dikategorikan sebagai disparitas sedang. Pertumbuhan ekonomi di provinsi ini menunjukkan potensi yang signifikan, yang didorong oleh akumulasi pertumbuhan berbagai kota dan kabupaten di wilayah tersebut Ramadhani, (2019).

Dalam konteks ini terdapat salah satu kawasan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, yakni Kawasan Metropolitan Gerbangkertosusila. Kawasan ini menjadi pusat utama

kegiatan perekonomian karena didukung infrastruktur yang memadai, konsentrasi industri, serta aktivitas perdagangan perdagangan jasa yang lebih berkembang menjadikannya sebagai motor penggerak pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur.

Gerbangkertosusila, dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, (1997), nomor 4, yang merupakan inisiatif strategis untuk mengatur pengembangan wilayah dan meningkatkan konektivitas antar daerah di Jawa Timur. Kawasan ini awalnya dikenal sebagai Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) tujuan dari pembentukan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Gerbangkertosusila adalah untuk mencapai pembangunan yang merata dan mengatasi masalah urbanisasi di sekitar Kota Metropolitan (Ridho'i, 2019)

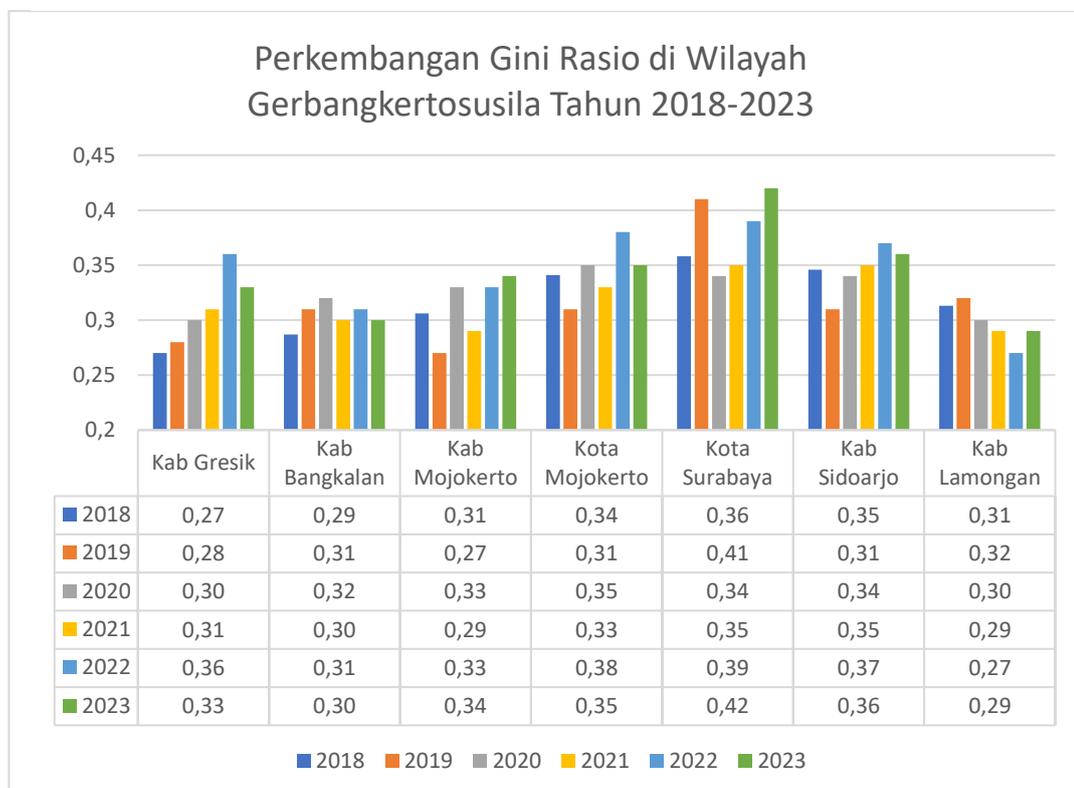
Gerbangkertosusila berfungsi sebagai kawasan strategis yang mencakup beberapa kota dan Kabupaten mencakup Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan. Gerbangkertosusila disebut sebagai *Spatial integrated* yang merujuk pada penggabungan pendekatan dalam perencanaan dan pengembangan wilayah yang mengutamakan integrasi berbagai aspek spasial, seperti transportasi, infrastruktur, dan layanan publik untuk menciptakan suatu sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan. Konsep ini sangat penting dalam konteks pengembangan kawasan metropolitan seperti Gerbangkertosusila di Jawa Timur yang diharapkan dapat menjadi kawasan kegiatan ekonomi yang berdaya saing global, serta mendukung integrasi wilayah metropolitan di sekitarnya

Pada tahun 2011, gagasan Gerbangkertosusila Plus diperkenalkan untuk memperluas dukungan bagi kota inti dan kawasan pendukung, menandakan

adaptasi terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Peraturan Presiden,(2022) mengenai Gerbangkertosusila, khususnya dalam Perpres No. 66 Tahun 2022, menetapkan kawasan ini sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur. Dengan luas mencapai 6.373,2 km².

Menurut pandangan Putra & Salim,(2022) kawasan Gerbangkertosusila berfungsi sebagai pusat-pinggiran yang saling ketergantungan, di mana perkembangan satu kota berpengaruh terhadap kota-kota di sekitarnya, menciptakan jaringan ekonomi yang kuat. Dengan adanya berbagai kebijakan dan program yang mendukung, Gerbangkertosusila terus berupaya untuk menjadi pusat perekonomian yang berdaya saing tinggi di Indonesia, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Grafik 1.4 Perkembangan Gini Rasio di Wilayah Gerbangkertosusila



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur,2024 diolah

Indeks Gini yang signifikan diperoleh dari analisis distribusi pendapatan di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. Salah satu contohnya adalah Kota Surabaya, yang mencatatkan indeks Gini tertinggi sebesar 0,42. Angka ini jauh melebihi rata-rata indeks Gini Provinsi Jawa Timur, yang tercatat sebesar 0,39. Peningkatan yang mencolok ini menunjukkan adanya disparitas pendapatan yang sangat signifikan di Surabaya. Sebaliknya, Kabupaten Lamongan mencatatkan Gini Rasio pada tahun yang sama, yaitu sekitar 0,29 menandakan tingkat disparitas pendapatan yang lebih rendah.

Temuan ini memberikan wawasan penting tentang dinamika disparitas pendapatan di Jawa Timur, di mana perbedaan yang mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan mencerminkan tantangan yang kompleks dalam mencapai kesetaraan ekonomi. Sebuah penelitian oleh Amaliyah & Arif, (2023) menunjukkan bahwa di Kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, berkontribusi signifikan terhadap perekonomian di daerah penyangga sekitarnya.

Penelitian ini mengindikasikan hubungan positif antara pengembangan infrastruktur dan investasi dengan pertumbuhan ekonomi yang merata di Gerbangkertasusila. Hal ini sejalan dengan teori *growth pole* yang menyatakan bahwa pusat pertumbuhan dapat menciptakan efek positif (*spillover effect*) bagi daerah di sekitarnya. Lebih lanjut, dalam konteks pertumbuhan wilayah, Lutfiani & Yuniasih, (2021). mengemukakan dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Gerbangkertasusila. Menyatakan bahwa investasi, baik domestik maupun asing, memiliki peran penting dalam memperkuat pusat-pusat pertumbuhan di kawasan tersebut.

Diperkuat oleh penelitian oleh Lutfiani & Yuniasih,(2021) mengkaji perkembangan ekonomi di Kota Sidoarjo yang terintegrasi dengan Surabaya. Penelitian ini mengemukakan bahwa pusat-pusat produksi dan industri yang berlokasi di Surabaya mendukung pertumbuhan sektor lain di Sidoarjo dan menciptakan lapangan kerja serta peluang ekonomi yang lebih baik,hal ini menunjukkan bagaimana pemusatan aktivitas ekonomi di pusat-pusat tertentu dapat berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi di daerah sekitar.

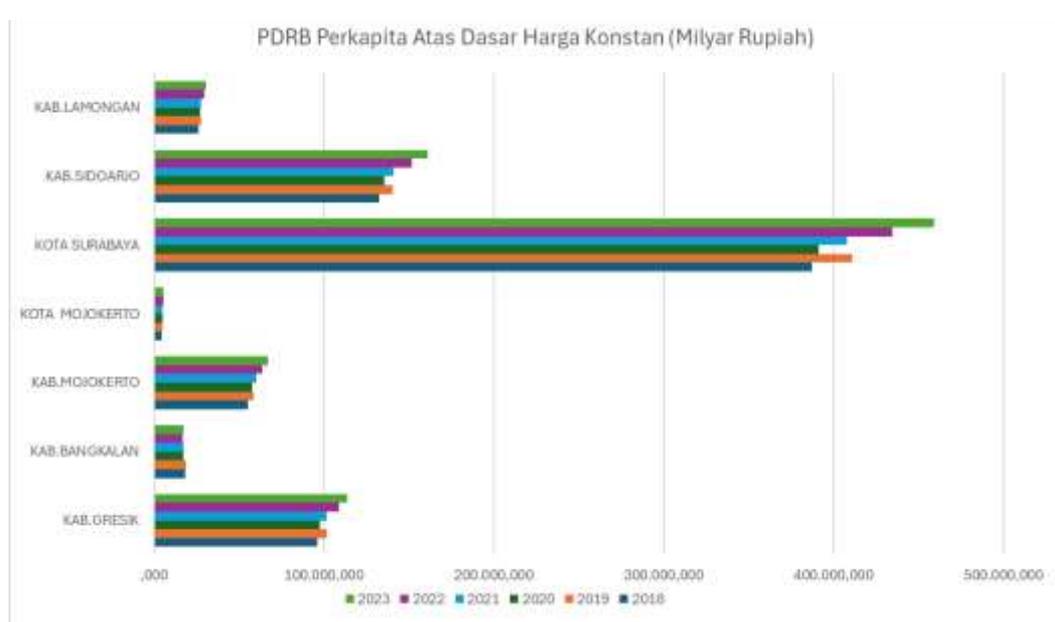
Dengan mengintegrasikan beberapa daerah dalam satu wilayah,yaitu wilayah Gerbangkertasusila diharapkan dapat tercipta pemerataan pembangunan yang lebih baik, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik,mengingat bahwa wilayah ini memiliki potensi besar dalam sektor industri, perdagangan, dan jasa, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Aliya & Soelistyo,(2020).

Namun, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan, salah satunya adalah faktor pertumbuhan ekonomi, dimana menurut pandangan Ghifara et al.,(2022) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat memperburuk disparitasdistribusi pendapatan, terutama di kota-kota metropolitan di Indonesia.. Sejalan dengan itu, penelitian klasik oleh Kuznets,(1955) mengemukakan hipotesis bahwa terdapat hubungan berbentuk kurva-U terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan, di mana pada awal pertumbuhan, ketidaksetaraan cenderung meningkat sebelum akhirnya menurun pada fase pertumbuhan yang lebih matang. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi ditingkat daerah yang sering dianalisa adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang

terjadi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi semakin baik, ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB yang meningkat.

Rahayu & Amanda,(2022) menyoroti bahwa faktor Produktivitas Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita memiliki pengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di provinsi-provinsi Indonesia. Selaras dengan Pandangan Hartanti & Taufiq,(2023) mengamati bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mempersempit disparitas pendapatan ketika disertai dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Dalam analisisnya, menekankan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi terjadi, distribusi pendapatan tetap tidak merata, dan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu menjamin peningkatan kesejahteraan yang merata di masyarakat. Namun, menurut pandangan Sayifullah,(2021) pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat memperlebar kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat yang berbeda, sehingga menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan

Grafik 1.5 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Kab/Kota di Wilayah Gerbangkertosusila (Milyar Rupiah) Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 diolah

Dari analisis yang disajikan dalam Gambar Grafik 1.3 diatas , terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila mengalami fluktuasi yang signifikan dan distribusinya tidak merata di antara setiap kabupaten dan kota di kawasan tersebut. Data pertumbuhan ekonomi untuk periode 2018-2023 menunjukkan bahwa Kota Surabaya mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023, dengan angka pertumbuhan mencapai 157.664,9 (Milyar Rupiah). Hal ini mengindikasikan bahwa Surabaya berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya selama periode tersebut. Sebaliknya, Kabupaten Bangkalan mengalami pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2023, dengan angka pertumbuhan sebesar 15.721,3 (Milyar Rupiah). Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan ekonomi, sehingga mencatat angka pertumbuhan yang paling rendah dibandingkan dengan wilayah lain.

Kawasan Gerbangkertosusila, meliputi kota-kota besar seperti Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Namun, analisis menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan dalam laju pertumbuhan ekonomi di kawasan ini, dengan disparitas yang mencolok antara kota-kota metropolitan dan kabupaten sekitarnya. Kesenjangan signifikan dalam distribusi pendapatan antara Surabaya dan wilayah-wilayah lain di Gerbangkertosusila. Hal ini membuat Surabaya menjadi magnet bagi investor dan tenaga kerja, namun juga meningkatkan disparitas pendapatan di wilayah tersebut (Putra & Salim, 2022).

Selain faktor pertumbuhan ekonomi faktor lainnya yang mempengaruhi disparitas pendapatan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka. Menurut pandangan

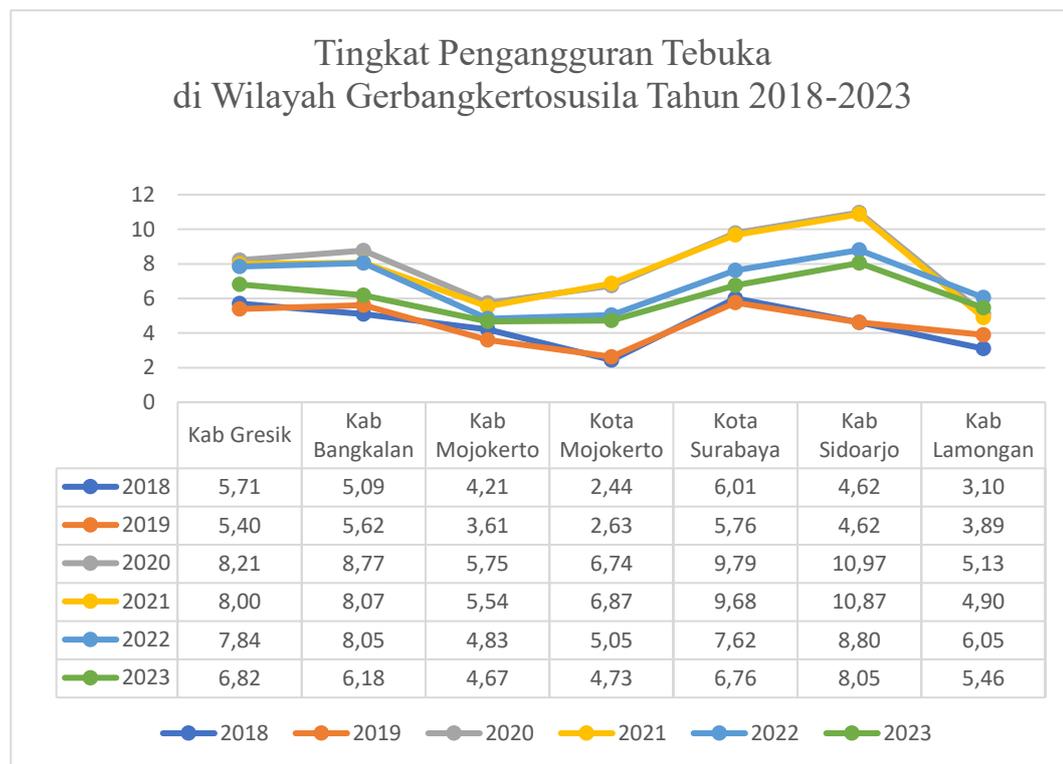
Nguyen & Le,(2022) Isu ekonomi merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, di mana pengangguran menjadi salah satu masalah utama yang berdampak signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Khayati & Setyowati,(2024) Tingkat Pengangguran Terbuka mencakup individu yang berusia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan, dan sedang aktif mencari pekerjaan. Fenomena ini menjadi perhatian vital dalam studi ekonomi dan sosial, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi, mengurangi daya beli masyarakat, dan memperburuk disparitas pendapatan. Faktor-faktor yang memicu tingkat pengangguran dapat meliputi densitas populasi yang tinggi, di mana jumlah pencari kerja melebihi kesempatan kerja yang tersedia, serta rendahnya pendapatan per kapita yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kontemporer juga berperan dalam menciptakan tantangan baru di pasar kerja, di mana otomatisasi dan digitalisasi dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu (Shabbir et al.,2021).

Simalango & Sri Setiawati,(2024) berpendapat bahwa faktor-faktor yang memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka turut menyumbang pada peningkatan disparitas pendapatan, sehingga diperlukan strategi yang komprehensif untuk menanggulangi masalah ini. Namun, menurut pandangan Farhan & Sugianto,

(2022) mengindikasikan bahwa pengangguran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di Pulau Jawa, hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengangguran dapat menjadi faktor yang relevan, tetapi tidak selalu menjadi penyebab utama disparitas pendapatan.

Grafik 1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka di Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 diolah

Pada Grafik 1.6 yang mengilustrasikan perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan, Kota Sidoarjo dan Kota Surabaya mencatatkan tingkat pengangguran yang relatif tinggi selama delapan tahun terakhir dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di wilayah Gerbangkertosusila. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Kota Sidoarjo mencatat tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2020 dan 2021, masing-masing sebesar 10,97% dan 10,87%. Demikian pula, Kota Surabaya mengalami tingkat pengangguran

tertinggi pada periode yang sama, yaitu 9,79% dan 9,68%. Tingkat pengangguran yang signifikan tersebut secara makroekonomi berdampak substansial terhadap kesejahteraan sosial masyarakat (Hasan & Sun'an, 2020).

Fenomena ini tidak hanya terbatas pada dua kota besar tersebut. Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto juga mengalami tingkat pengangguran yang tinggi antara tahun 2020 dan 2021. Peningkatan angka pengangguran di daerah ini dapat diatribusikan kepada dampak pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020. Banyak sektor ekonomi mengalami penurunan yang drastis, yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan berkurangnya peluang kerja bagi masyarakat (Marginingsih, 2021). Namun, pada tahun 2022, terdapat indikasi perbaikan yang terlihat dengan penurunan persentase pengangguran di seluruh wilayah kota dan kabupaten Gerbangkertosusila. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan Kabupaten Lamongan, yang justru mengalami kenaikan tingkat pengangguran pada tahun 2022.

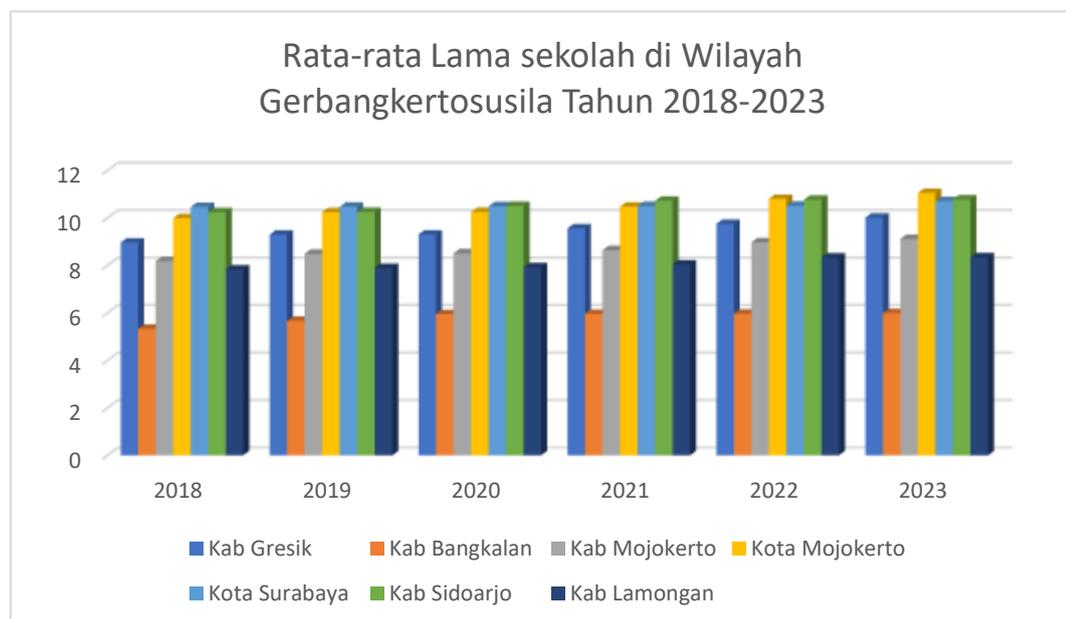
Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam hasil yang mengkaji pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap disparitas pendapatan, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perbedaan subjek penelitian dan kondisi ekonomi lokal. Hal ini menciptakan peluang untuk melakukan pengujian ulang dengan mempertimbangkan variabel tambahan yang relevan

Salah satu faktor tambahan yang dapat diuji untuk mempengaruhi disparitas pendapatan adalah aspek pendidikan, dimana aspek pendidikan memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Salah satu alat pengukur pendidikan yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Rata-rata lama sekolah mencerminkan jumlah tahun yang dihabiskan penduduk dalam pendidikan formal, yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia.

Menurut Penelitian Dai et al., (2023) menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah, berpengaruh signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan di kawasan Barat dan Timur Indonesia dimana hal ini, menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan potensi pendapatan individu, sehingga berkontribusi pada pengurangan ketimpangan.

Grafik 1 7 Rata-rata Lama sekolah di Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 diolah

Pada grafik 1.7 di atas, menunjukkan bahwa rata-rata lama pendidikan masyarakat di kawasan Gerbangkertosusila mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Namun, Kabupaten Bangkalan mencatatkan persentase

rata-rata lama pendidikan terendah dibandingkan dengan wilayah lainnya, seperti Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan. Sebaliknya, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, dan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tingkat rata-rata lama pendidikan yang hampir seragam sepanjang tahun. Fenomena ini mencerminkan adanya disparitas dalam pencapaian pendidikan di Gerbangkertosusila, di mana Kabupaten Bangkalan tertinggal dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di wilayah Gerbangkertosusila berada pada kisaran 9 hingga 10 tahun, yang mencerminkan bahwa penduduk di wilayah ini rata-rata menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam akses pendidikan, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan mereka hingga tingkat yang lebih tinggi. Karena saat ini pendidikan tingkat SMA di Jawa Timur berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, penting bagi pemerintah provinsi untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan di wilayah ini agar tidak terjadi ketimpangan.

Wajib belajar 12 tahun di Indonesia merupakan salah satu kebijakan pendidikan yang diatur dalam kerangka hukum nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga negara, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam konteks ini, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan hukum yang fundamental. Menurut Herawati et al., (2021) dukungan dari komite sekolah sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan pendidikan dapat membantu mengatasi tantangan yang ada. Dengan melibatkan masyarakat dan meningkatkan kolaborasi antara sekolah dan pemerintah, diharapkan dapat tercipta sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas, yang pada akhirnya akan mengurangi disparitas pendidikan di wilayah tersebut.

Penelitian ini memiliki signifikansi, baik secara teoretis maupun kebijakan. Dari segi teoretis, penelitian ini menawarkan model konseptual bukan hanya sekadar aspek-aspek ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka, namun juga melibatkan persoalan pendidikan sebagai faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi hasil pembangunan. Dengan mengintegrasikan pendidikan ke dalam model analisis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Secara kebijakan, penelitian ini bisa berkontribusi terhadap rekomendasi kebijakan yang lebih terarah dan efektif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga mencakup periode yang lebih baru, yaitu dari tahun 2016 hingga 2023, dimana pada tahun 2023, telah terjadi pemulihan ekonomi di berbagai sektor setelah pandemi COVID-19, yang tentunya dapat mempengaruhi dinamika di wilayah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk

memberikan perspektif baru yang lebih relevan dan terkini dalam memahami disparitas pendapatan di wilayah Gerbangkertosusila sebagai daerah penyangga. Berangkat dari permasalahan dan *research gap*, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap Disparitas Pendapatan di wilayah Gerbangkertosusila Sebagai Daerah Penyangga

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Disparitas pendapatan di Wilayah Gerbangkertosusila?
2. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Disparitas pendapatan di Wilayah Gerbangkertosusila?
3. Apakah Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh terhadap Disparitas pendapatan di Wilayah Gerbangkertosusila?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap disparitas pendapatan di wilayah Gerbangkertosusila
2. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap disparitas pendapatan di wilayah Gerbangkertosusila
3. Untuk menganalisis pengaruh Rata-rata Lama Sekolah terhadap disparitas pendapatan di wilayah Gerbangkertosusila

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur mencakup data dari 2016 hingga tahun 2023, untuk mendapatkan gambaran terkini mengenai kondisi ekonomi di Gerbangkertosusila.. Dianalisis menggunakan metode Analisis Regresi Data Panel.

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada daerah Gerbangkertosusila, mencakup KabupatenGresik,Kabupaten Bangkalan,Kabupaten Mojokerto,Kota Mojokerto,Kota Surabaya,Kabupaten sidoarjo,Kabupaten Lamongan dengan variabel Pertumbuhan Ekonomi,Tingkat Pengangguran Terbuka,serta Rata-rata Lama Sekolah sebagai Variabel Bebas (*Independent*) dan variabel Disparitas Pendapatan sebagai Variabel Terikat (Dependen) sebagai alat ukur.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Pemerintah

Memberikan informasi yang akurat dan berbasis data dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi disparitas pendapatan di Wilayah Gerbangkertosusila.

2. Manfaat bagi Peneliti berikutnya

Memberikan informasi untuk memperdalam pemahaman tentang dinamika ekonomi dan sosial yang mempengaruhi disparitaspendapatan, serta untuk mengembangkan teori-teori baru yang relevan

3. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan teori-teori kebijakan publik yang lebih efektif dalam mengatasi disparitaspendapatan.

4. Manfaat Praktis

Menjadikan penelitian ini sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dalam mengatasi disparitas pendapatan.